

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Presiden Joko Widodo memiliki visi NAWACITA yang merupakan sembilan prioritas pembangunan nasional. NAWACITA digunakan untuk fokus pembaharuan menjadi Indonesia yang memiliki kedaulatan secara politik, serta mampu mandiri dalam melakukan pengelolaan ekonomi dan mempunyai kepribadian yang berbudaya. Pada poin ketiga dari NAWACITA tersebut bertuliskan bahwa pembangunan Indonesia berawal dari tepian dengan menguatkan daerah-daerah dan desa yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada poin tersebut disebutkan salah satunya adalah pembangunan pada tingkat desa, dengan diberikannya dana pada tiap desa yang semakin meningkat oleh pemerintah pusat. Desa sendiri menjadi satuan wilayah administratif yang berada pada tingkat paling dasar ketatanegaraan di Indonesia, namun saat ini desa memasuki era pembaharuan setelah lahirnya UU Desa. Adanya UU tersebut diharapkan dapat membuat perkembangan desa menjadi wilayah administratif yang memiliki kemandirian sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Undang undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab X berisikan tentang adanya Badan Usaha Milik Desa atau biasa diistilahkan sebagai BUMDes. BUMDes sendiri merupakan suatu badan usaha dimana keseluruhan atau sebagian modalnya merupakan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Dengan adanya undang-undang ini desa seakan menjadi unit pemerintahan terkecil yang bisa dibilang sebagai penopang pembangunan Indonesia. “Desa membangun dan Membangun Desa” menjadi suatu slogan pemerintah untuk rencana pembangunan Indonesia yang berawal dari wilayah administratif paling dasar yaitu desa.

Badan Usaha Milik Desa adalah suatu kelembagaan ekonomi pada tingkat desa yang dibentuk dengan peranan masyarakat dan perangkat desa melihat kebutuhan dan potensi desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 sendiri berisikan tentang pengelolaan, pengurusan, modal, pendirian, organisasi pengelola, dan segala sesuatunya tentang BUMDes. Pada Peraturan Menteri tersebut tertulis dengan jelas bahwa BUMDes adalah suatu unit usaha berbadan hukum yang mampu menjalankan bisnis dalam bidang sosial, pemanfaatan sumber daya lokal, bisnis penyewaan dan lain sebagainya yang merupakan potensi dan peluang bagi desa yang bersangkutan. Dengan demikian keberadaan BUMDes menjadi faktor penggerak ekonomi masyarakat dan kemandirian desa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk bisa mengelola suatu BUMDes secara maksimal dan tepat sasaran maka para pengurus BUMDes harus menjalankan BUMDes tersebut dengan prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, kooperatif, partisipatif, emansipatif dan sustainabel dengan memiliki sistem keanggotaan dasar yang tertata dan *self help* yang dikerjakan secara profesional dan mandiri (Purnomo, 2016; Widiastuti dkk., 2019). Prinsip tata kelola BUMDes berbeda dengan 5 prinsip tata kelola korporasi yang bertujuan pada peningkatan nilai suatu perusahaan, tata kelola BUMDes bertujuan untuk penguatan taraf ekonomi pada suatu desa dengan menjalin kerjasama yang kuat, membangun rasa kebersamaan, dan menjalin kerekatan di semua lapisan masyarakat desa dengan basis pendirian BUMDes sendiri adalah kawasan perdesaan (Purnomo, 2016). Penerapan tata kelola di seluruh BUMDes dilihat dari rata-ratanya masih mengindikasikan bahwa penerapan indikator tata kelola masih mencapai tingkatan relatif rendah. BUMDes yang mempunyai indikator tata kelola yang tinggi adalah BUMDes yang sudah memiliki umur 8 dan 9 tahun. Sedangkan BUMDes yang memiliki tata kelola terendah adalah BUMDes yang mempunyai umur kurang dari 2 tahun dan masih bisa dimasukkan dalam kategori BUMDes rintisan. Melihat secara keseluruhan poin tata kelola yang ada, poin sustainabel merupakan poin dengan keterterapan yang tergolong rendah secara rata-rata (Widiastuti dkk., 2019).

Diperlukan usaha suatu perusahaan menerapkan tata kelola agar perusahaan memiliki kinerja yang baik dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Banyak

penelitian merekomendasikan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang buruk menjadi suatu penyebab kinerja yang tidak memadai dan kekhawatiran di antara para pemangku kepentingan (Mcgee, 2009). Telah banyak dilakukan penelitian yang menghubungkan antara tata kelola dan kinerja perusahaan (Darwanto dan Chairiri, 2019; Alsagr dkk., 2018; Warrad dan Khaddam, 2019; Chabachib, 2019; Balagobei, 2018; Al-Beshtawi dkk., 2014; Adedeji dkk., 2019). Kinerja perusahaan adalah hasil dari seluruh aktivitas perusahaan yang menjadi suatu tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan.

BUMDes disini mempunyai perbedaan dengan perusahaan secara umum. Menurut PERMENDES nomor 4 tahun 2015, tujuan berdirinya suatu BUMDes mencakup peningkatan taraf perekonomian suatu desa, mampu membuka lapangan kerja, menjadi suatu penyebab peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan dapat meningkatkan pendapatan dari dua sisi yaitu masyarakat maupun desa yang bersangkutan. Upaya untuk mengetahui apakah suatu BUMDes telah dijalankan dengan baik, maka diperlukan adanya evaluasi, yaitu pengukuran kinerjanya. Penilaian kinerja pada suatu BUMDes dapat mengambil indikator pada kinerja organisasi. Kinerja organisasi sendiri mengacu pada keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan segi keuangan dan non-keuangannya (Li dkk., 2006). Hal ini dirasa tepat dikarenakan BUMDes yang mempunyai tujuan baik dari segi laba dan segi lingkungan seperti yang tertuang pada PERMENDES nomor 4 tahun 2015. Pengukuran kinerja berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, kualitas layanan, dan kepatuhan dengan standar normatif (Skelcher dan Mathur, 2004). Dengan berdasar pada tujuan BUMDes yang juga memiliki kepentingan sosial masyarakat, maka poin dalam kinerja BUMDes menjadi hal yang tepat dan menarik untuk diteliti.

Pondasi perekonomian yang kuat di Indonesia salah satunya ada di Desa. Desa memiliki BUMDes yang memiliki unit usaha bermacam-macam. Ada usaha simpan pinjam, pasar desa, perdagangan umum, pengelolaan air, jasa hingga pengelolaan sampah. Semua usaha BUMDes bertujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Jika Indonesia ingin menjadi negara yang berekonomi kuat, maka harus dipastikan bahwa pondasi dari perekonomian negara

memiliki kualitas yang baik. Dalam hal ini penulis melihat bahwa BUMDes harus baik secara tata kelola dan baik juga dalam hal kinerja keuangan maupun non keuangan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini fokus untuk memahami Tata Kelola BUMDes dalam hubungannya dengan kinerja organisasi BUMDes.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang *Good Governance* atau tata kelola. Penelitian Widiastuti dkk., (2019) melakukan penyusunan indikator tata kelola BUMDes dan pengukuran pada praktik tata kelola BUMDes, sedangkan penelitian ini menghubungkan antara tata kelola BUMDes dengan kinerja BUMDes. Penelitian Jaswadi (2016) dan Mswaka dan Aluko (2015) mengukur tingkat penerapan *Good Governance* yang ada pada usaha kecil mikro dan menengah. Berbeda dengan penelitian ini yang mengambil objek Badan Usaha Milik Desa. Penelitian Pramita (2018) melihat penerapan akuntabilitas pada BUMDes. Pada penelitian ini meneliti menggunakan enam prinsip BUMDes yaitu transparansi, akuntabilitas, kooperatif, partisipatif, emansipatif dan sustainabel. Penelitian Haque (2016) menghubungkan antara variabel tata kelola dengan kinerja keuangan. Kesenjangan dengan penelitian ini menghubungkan tata kelola dengan kinerja organisasi yang terdiri dari kinerja keuangan dan non keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan kesenjangan penelitian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tata kelola terhadap kinerja BUMDes.

1.4 Ringkasan metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Kuesioner menggunakan skala Likert dengan angka 1 sampai 5 untuk memperlihatkan tingkat persetujuan responden pada pertanyaan di kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah BUMDes yang berada di Jawa Timur. Data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dibantu dengan program SPSS 25.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BUMDes. Besarnya pengaruh tata kelola terhadap kinerja suatu BUMDes adalah 31,8%.

1.6 Kontribusi Riset

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan informasi tentang penerapan tata kelola dan kinerja BUMDes yang berada di Jawa Timur, sehingga diharapkan dapat memberikan stimulus agar meningkatkan tata kelola dan kinerja BUMDes
2. Bagi pengurus BUMDes, diharapkan dapat menjadi tolak ukur kualitas BUMDes yang ada saat ini dan dapat memicu kepatuhan atas tata kelola BUMDes yang lebih baik serta memperbaiki kinerja organisasi yang dinilai dari segi keuangan dan non-keuangan.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memberikan referensi dalam BUMDes di Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Penentuan sistematika penulisan memiliki tujuan agar mempermudah penulis ketika melakukan penyusunan dan mempelajari keseluruhan bagian penulisan skripsi. Sistematika penulisan yang diterapkan pada penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penulis dalam pengambilan topik

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimulai dari masalah penelitian, beberapa teori pendukung aspek-aspek penelitian, dan kerangka analisa perihal penelitian ini.

BAB 3 Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk menganalisis hasil dari data yang telah terkumpul

BAB 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai analisa penulis terhadap hasil yang telah diolah menggunakan program SPSS.

BAB 5 Simpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang ringkasan hasil dan simpulan dari penelitian yang telah dikerjakan oleh penulis dan terdapat saran yang diharapkan mampu menjadi acuan bagi pengguna hasil penelitian ini serta menjelaskan terkait keterbatasan penelitian.